

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ahmad Rizal, 2017, *Pelaksanaan Perizinan Minimarket Di Kabupaten Wajo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Victor M.
- Bagir Manan, 1995, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Makalah ini tidak dipublikasikan, Jakarta.
- Didik Sukriono, 2013, *Hukum konstitusi dan konsep otonomi*, Malang: Setara Pres.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2010, *Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Perda (Suatu Kajian Teoritis Dan Pratis Disertai Dengan Manual)*, Jakarta: Prenada Media grup.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa.
- Lexi J. Moleong, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi Hadari, 1992, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: Kencana.
- Philipus, 1999, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Pipin Syahrifin dan Dedah Jubaedah, 2005, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwoto, 1994, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Situmorang, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994
- Sjachran Basah , 1995, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya: FH UNAIR.
- Sumarto Hetifa Sj, 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Supardi, M.d, 2006, *Metodologi Penelitian*. Mataram : Yayasan Cerdas Press.
- Tutik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Victor M. Situmorang, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, hlm 10, diakses <https://books.google.co.id>.
- Yuliandri, 2009, *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan*, Jakarta:Grafindo Persada.

Jurnal

- Aisyah Dinda K, Hendro Saptono & Henny Juliani, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Minimarket) ”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, (2016)
- Andi Triyawan & Kurnia Firmanda Jayanti, “Analisis Pengaruh Toko Ritel Modern Terhadap Pedagang Tradisional Dalam Prespektif

- Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1, Februari (2016)
- Eny Kusdarini, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, No. 4, (Oktober 2017)
- Ita Mutiara Dewi, “Implementasi Kebijakan Perencanaan Penataan Toko Modern Berjaringan Nasional di Kabupaten Sleman dalam Studi Ekonomi Politik”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 19, No. 1, (April 2014)
- Ni Komang Devayanti Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional di Era Liberalisasi Perdagangan”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 4, No. 1, (2018).
- Nur Isni Atun, “Pengaruh Modal, Lokasi dan Jenis Dagangan Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Prambanan Kabupaten Sleman”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 5, No. 4, (2016)
- Rahadi Wasi Bintoro, “Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, (2010).
- Tri Joko Utomo, “Persaingan Bisnis Ritel Tradisional vs Modern”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2011)
- Tri Wahyuningsih & Harry B. Harmadi, “Analisis Lokasi dan Pola Sebaran Pasar Modern di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 2, (2015)
- Sucipto, “Pengaturan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha yang Sehat Menurut Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 3, (2017)

Skripsi

- Ahmad Rizal, 2017, “Pelaksanaan Perizinan Minimarket di Kabupaten Wajo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012”, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar)
- Ayu Lestari, 2017, “Implementasi Kebijakan Perizinan Toko Modern Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

I Wayan Wijana, 2015, “Pengaturan Hukum Toko Modern Waralaba Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional Di Kota Denpasar”, Skripsi Universitas Mahasaraswati Denpasar

Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Kabupaten Sleman.

Media Internet

Anonymous, *Desak Pembatasan Kuota Minimarket*. Diakses Pada World Wide Web at <http://www.asparindo.com/berita-utama/read/3/asparindo-desak-pembatasan-kuota-minimarket/> tanggal 31 Juli 2018 Pukul 19:34 WIB.

<http://skripsi-ilmiah.blogspot.co.id/2013/02/peranan-pemerintah-daerah>

[dalam.html.http://intanalkaff.blogspot.com/2017/03/perkembangan-ritel-di-indonesia.html](http://intanalkaff.blogspot.com/2017/03/perkembangan-ritel-di-indonesia.html), diakses pada tanggal 31 Juli 2018 Pukul 19:11 WIB.